

PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN MELALUI KEMITRAAN USAHA

Saptana dan Ashari

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jalan Ahmad Yani No. 70, Bogor 16161

ABSTRAK

Pembangunan (termasuk sektor pertanian) di Indonesia pada masa lampau yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di masa mendatang, diperlukan reorientasi paradigma pembangunan, baik dari segi arah, strategi maupun kebijakan. Paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan dapat menjadi solusi alternatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan akan makin optimal jika disinergikan dengan komitmen untuk membangun kemitraan di antara pelaku agribisnis. Makalah ini bertujuan untuk mengulas beberapa kasus kegagalan pembangunan pertanian konvensional, paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan dan konsep kemitraan usaha, serta perspektif pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan agribisnis. Hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan pertanian konvensional pada pertanian tanaman pangan, perikanan, dan kehutanan telah menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan usaha dapat menjamin terciptanya efisiensi dan pertumbuhan, keadilan dan pemerataan, serta berwawasan lingkungan. Untuk mendukung upaya ini diperlukan konsolidasi kelembagaan yang mantap, baik di tingkat petani, pihak swasta maupun pemerintah.

Kata kunci: Sektor pertanian, pembangunan berkelanjutan, kemitraan agribisnis, sumber daya alam

ABSTRACT

Sustainable agricultural development through agribusiness partnership

The development (included agricultural sector) in Indonesia in the last decade that more focused on economic growth, has caused negative impact on natural resource and environment degradation. To maintain the development activity in the future, it is needed to change the development paradigm orientation in term of direction, strategy and policy. The sustainable agricultural development paradigm can be chosen as the best solution to increase social welfare, without neglecting natural resource and environment preservation. Sustainable agricultural development will be succeed, if could be integrated by a strong commitment among agribusiness actors. This paper aims to review any cases of failure in conventional agricultural development, paradigm of sustainable agricultural development and partnership concept, and the strategy of agribusiness partnership to achieve the sustainable agricultural development. The result showed that the conventional agricultural development in food crops, fisheries and forestry has met any failures, mainly related to natural resource preservation. The sustainable agricultural development approach is prospective to create both of efficiency and growth, justice and equity, and more environmental friendly. To achieve more effective results, sustainable agricultural development should be supported by institution consolidation in the farmer level, private, and government.

Keywords: Agricultural sector, sustainable development, agribusiness partnership, natural resource

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai buah keberhasilan pembangunan telah menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Sebagai gambaran, sektor pertanian yang bertumpu pada potensi sumber daya alam banyak mengalami pengurangan sehingga ketersediaan dan kualitas sumber daya alam makin menurun. Akibatnya, setelah hampir empat dasawarsa pembangunan berlangsung, kondisi pertanian nasional masih dihadapkan pada berbagai masalah,

antara lain: 1) menurunnya kesuburan dan produktivitas lahan, 2) berkurangnya daya dukung lingkungan, 3) meningkatnya konversi lahan pertanian produktif, 4) meluasnya lahan kritis, 5) meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, 6) menurunnya nilai tukar, penghasilan dan kesejahteraan petani, 7) meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di pedesaan, dan 8) terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat.

Masalah tersebut muncul karena pembangunan selama ini cenderung bias

pada pemacuan pertumbuhan produksi, serta peran pemerintah dan swasta sangat dominan. Masyarakat petani hanya berperan sebagai objek, bukan sebagai subjek pembangunan. Sektor pertanian juga tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi ekonomi nasional, tetapi sebagai penyangga untuk menyukseskan industrialisasi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Sebagai penyangga, sektor pertanian berperan untuk mendongkrak produksi pangan dalam negeri secara cepat dan tidak berisiko secara politik. Meminjam istilah Prof.

Dr. Emil Salim, pembangunan ekonomi seperti itu sering disebut sebagai “pola pembangunan konvensional”. Pola tersebut kini sudah usang, bahkan menimbulkan dampak negatif serta memicu konflik akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, sehingga pola alternatif perlu diajukan.

Perubahan lingkungan strategis berupa globalisasi ekonomi, otonomi daerah, perubahan preferensi konsumen, dan kelestarian lingkungan menuntut adanya perubahan serta penyesuaian operasional kelembagaan, termasuk kelembagaan pertanian. Globalisasi ekonomi menyebabkan makin terintegrasinya berbagai aspek perekonomian suatu negara dengan perekonomian dunia, serta meningkatnya persaingan baik antarpelaku agribisnis maupun antarnegara. Kebijakan desentralisasi diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pembangunan pertanian di pedesaan. Sejalan dengan globalisasi ekonomi dan otonomi daerah, terjadi pula perubahan besar pada preferensi konsumen terhadap produk-produk pertanian. Dewasa ini konsumen tidak lagi membeli komoditas, tetapi membeli produk dengan atribut yang lebih lengkap.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan paradigma baru pembangunan, baik mengenai arah, strategi maupun kebijakan, agar berbagai masalah yang muncul dapat dipecahkan tanpa menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Makalah ini mengulas beberapa kasus kegagalan pembangunan pertanian konvensional, paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan dan konsep kemitraan usaha agribisnis, serta strategi kemitraan usaha untuk mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan.

KASUS KEGAGALAN PEMBANGUNAN PERTANIAN KONVENSIONAL

Pembangunan yang hanya berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan telah mengakibatkan dampak negatif pada ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Uraian berikut menyajikan beberapa kasus kegagalan pembangunan pertanian di Indonesia, khususnya pada pertanian tanaman pangan (padi dan hortikultura), perikanan (ikan dan udang), dan kehutanan.

Tanaman Pangan

Swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984, pada dasarnya berkat jasa sekitar 10,40 juta rumah tangga petani yang mendukung tahap pertama Revolusi Hijau tahun 1960-an (Sayogyo 1990). Para petani kecil dengan kepemilikan lahan kurang dari 1 ha per rumah tangga ternyata mampu menerapkan teknologi baru seperti benih bermutu dari varietas unggul, pemupukan berimbang, penggunaan pestisida, dan juga penggilingan gabah bermesin kecil (*Rice Milling Unit* = RMU). Singkatnya, tahap pertama modernisasi dan komersialisasi pertanian padi sawah telah tercapai. Tahapan berikutnya adalah penerapan secara luas teknologi budi daya padi yang secara bertahap telah disempurnakan mulai dari panca usaha tani, sapta usaha tani, 10 jurus kemampuan usaha tani hingga insus dan supra insus.

Pembangunan pertanian yang bias untuk memacu produksi khususnya padi telah berdampak negatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Di beberapa daerah di Jawa, petani menggunakan pupuk secara berlebihan, seperti urea, TSP, dan SP-36, sehingga menimbulkan residu zat kimia di dalam tanah dan air. Demikian pula penggunaan pestisida yang berlebih pada beberapa komoditas pangan telah menimbulkan resistensi dan resurjensi berbagai hama dan penyakit (Yusdja *et al.* 1992). Implikasinya adalah timbulnya serangan hama dan penyakit secara eksplosif, seperti serangan wereng coklat dan tikus pada tanaman padi, ulat grayak pada kedelai, serta berbagai hama dan penyakit pada komoditas hortikultura. Contoh lainnya adalah pembukaan lahan gambut 1 juta ha di Kalimantan Tengah yang telah menimbulkan dampak menurunnya keanekaragaman hayati.

Berbagai kegagalan pembangunan tersebut memberi pelajaran untuk mengubah orientasi pembangunan ke arah pembangunan pertanian berkelanjutan. Berkaitan dengan itu, pemerintah mengembangkan program pengendalian hama terpadu dengan melibatkan masyarakat tani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). PHT didasarkan pada keseimbangan ekologi, siklus alami, pemanfaatan pestisida nabati, serta melalui pendekatan partisipatif. Selain itu diintroduksikan pula Sistem Integrasi Padi Ternak (SIPT) untuk meningkatkan produksi padi dan daging nasional serta pendapatan petani. Pe-

laksanaan program tersebut cukup berhasil, namun kelembagaan yang dibangun masih bersifat kerja sama horizontal dan terfokus pada usaha tani, belum berorientasi membangun kelembagaan kemitraan usaha agribisnis secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengembangan SLPHT menjadi SL Agribisnis dan SIPT menjadi Sistem Integrasi Agribisnis Padi-Ternak merupakan alternatif yang lebih prospektif.

Kelembagaan kemitraan usaha agribisnis yang dapat mengeliminir berbagai kegagalan tersebut adalah kelembagaan usaha agribisnis terpadu, berupa keterpaduan antarpelaku (petani, pedagang, pengolah) dan produk (bahan baku berkualitas, penanganan pascapanen yang prima serta jaminan keamanan pangan). Model tersebut didukung oleh revitalisasi kelembagaan kelompok tani, penyuluhan pertanian, dan perusahaan mitra. Saptana *et al.* (2005) memberikan beberapa contoh pola kemitraan usaha agribisnis yang cukup berhasil, yaitu: 1) Pola Inti Plasma (PIR) antara Perusahaan Daerah Provinsi Bali dan petani sayuran di Kecamatan Baturiti, Tabanan, 2) kerja sama operasional agribisnis antara PT Bayu Jaya Kesuma dan petani stroberi di Kecamatan Sukasada, Buleleng, 3) PIR antara PT Putra Agro Sejati dan petani sayuran (gabo, puleleng, lobak, wortel, dan ubi jalar jepang) di Kabupaten Karo, dan 4) pola kerja sama tertutup sistem vendor melalui penyediaan bibit kentang Atlantik antara PT Indofood Fritolay Makmur dan petani atau kelompok tani di Cikajang, Cisereupan, dan Bayongbong (Garut) dan Kecamatan Pangalengan dan Ciwidey, Bandung.

Keberhasilan pola kemitraan agribisnis juga dijumpai pada usaha beras berkualitas antara PT Pertani dan petani padi di Kabupaten Sidrap dan Enrekang, Sulawesi Selatan (Saptana 2003). Dalam batas-batas tertentu, beberapa pemerintah daerah juga berhasil membina kelompok tani dalam menghasilkan padi dan beras organik, seperti di Kabupaten Cianjur dan Sragen.

Perikanan

Tekanan kemiskinan pada masyarakat pesisir menyebabkan mereka cenderung mengeksploitasi sumber daya pesisir dan lingkungan secara berlebihan, yang pada gilirannya akan menyebabkan degradasi sumber daya pesisir dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Kondisi ini

diperparah oleh kegiatan-kegiatan lain yang sering kurang mengindahkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, seperti konversi hutan mangrove untuk tambak ikan dan udang, pemukiman dan pabrik, serta pembuangan limbah ke laut.

Adanya tekanan kemiskinan dan kompetisi pembangunan berbagai sektor ekonomi menyebabkan sumber daya pesisir menghadapi masalah yang serius (Clark 1996), antara lain: 1) penurunan sumber daya alam seperti erosi dan abrasi, konversi hutan bakau, reklamasi pantai, penangkapan ikan dengan bahan berbahaya, penangkapan secara berlebihan (*overfishing*), dan eksploitasi hutan bakau, 2) polusi akibat pembuangan sampah serta limbah industri dan rumah tangga, aliran bahan-bahan kimia pertanian (pestisida dan pupuk), serta kegiatan lain seperti penggalian dan penambangan, 3) konflik penggunaan lahan akibat tertutupnya akses ke pantai karena padatnya pemukiman, kerusakan lahan akibat polusi, konversi dan pelestarian hutan bakau versus pemanfaatannya untuk tambak atau reklamasi menjadi daerah pemukiman dan kegiatan komersial lainnya, dan 4) kerusakan kehidupan dan kepemilikan akibat bencana alam seperti banjir, badai, gempa bumi, dan tsunami.

Indonesia merupakan negara dengan kontribusi produksi perikanan termasuk lima besar di dunia dengan pangsa > 5% produksi perikanan dunia. Nilai ekspor meningkat pesat dari US\$2,80 juta tahun 1968 menjadi US\$1,60 miliar tahun 2002 (Fauzi 2007).

Ikan dan udang merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi dengan volume ekspor cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada awalnya, penanaman modal di sektor perikanan mampu meningkatkan produksi dan ekspor, mendorong pertumbuhan sektor industri hulu (usaha pembenihan, industri pakan) dan hilir (*cold storage*), serta kegiatan pemasaran (Saptana dan Pranadji 1994). Namun dalam perkembangannya telah menimbulkan berbagai permasalahan.

Pada perikanan tangkap, penangkapan ikan di beberapa wilayah perairan telah mengarah kepada usaha untuk mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Pelarangan pengoperasian pukat harimau (*trawl*) mendorong para pengusaha domestik maupun Penanaman Modal Asing (PMA) beralih ke usaha budi daya udang di tambak. Hal ini menyebabkan eksploitasi beralih dari sumber daya

laut melalui usaha penangkapan ke sumber daya pantai, yang secara tradisional diusahakan oleh pertambakan rakyat. Gejala eksploitasi berlebih ditunjukkan oleh kegagalan tambak udang intensif yang selanjutnya mengakibatkan hancurnya tambak udang secara massal. Selain itu, kematian massal ikan di karamba jaring apung di Waduk Saguling dan beberapa waduk lainnya pada musim kemarau merupakan contoh pengelolaan sumber daya yang kurang tepat. Kondisi seperti ini terjadi akibat akumulasi cemaran sisa-sisa pakan, kotoran udang, dan residu pestisida.

Beberapa kasus di Jawa Timur dan Jawa Barat dapat menjadi contoh gejala eksploitasi tambak udang secara berlebih, seperti dikemukakan oleh Saptana dan Pranadji (1994). Kondisi tersebut mengakibatkan: 1) langkanya sumber air tawar untuk rakyat, karena banyak pengusaha tambak melakukan penyedotan air dari sumur dalam, 2) langkanya sumber pakan pada tambak rakyat akibat pemakaian bahan kimia pada pengeringan tambak intensif sehingga mengganggu ekosistem sekitar, 3) timbulnya pencemaran akibat penggunaan pakan buatan yang berlebihan, 4) menurunnya produktivitas dan usaha yang tidak berkelanjutan pada tambak udang intensif, 5) sulitnya memperoleh air berkualitas pada usaha tambak udang, dan 6) terganggunya ekosistem akibat makin berkurangnya ketersediaan sumber pakan alami.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain membatasi daerah penangkapan ikan dan melarang penggunaan pukat harimau, rotasi penanaman ikan, serta pemeliharaan udang dengan sistem tertutup, semi-intensif atau tradisional. Beberapa usaha telah menunjukkan keberhasilan, seperti pengembangan tambak udang semi-intensif dan tradisional dan rotasi penanaman ikan, baik di daerah sentra produksi lama maupun daerah bukaan baru. Namun, pembatasan daerah penangkapan dan pelarangan penggunaan pukat harimau belum berhasil, karena sulitnya mengawasi aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan teknologi tinggi.

Kehutanan

Hutan merupakan sumber daya alam terbarukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hutan merupakan aset

multiguna yang tidak saja menghasilkan kayu, arang, pulp dan lain-lain, tetapi juga memiliki nilai lain seperti pelindung panas, pemecah angin, dan pelindung tanah dari erosi. Hutan juga menjadi habitat satwa yang penting peranannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dengan kata lain, hutan tidak saja memberikan manfaat pada saat tanaman ditebang (manfaat eksploitasi), tetapi juga manfaat tatkala sumber daya ini dibiarkan (manfaat konservasi).

Hutan berperan sebagai penyeimbang kondisi iklim yang sehat dan bersih. Oleh karena itu, akibat kerusakan hutan bukan hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, tetapi juga masyarakat luas. Kasus meluapnya Bengawan Solo yang menenggelamkan beberapa desa di sepanjang alirannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan contoh pengelolaan hutan yang kurang bijaksana. Kasus lainnya adalah asap tebal akibat kebakaran hutan pada musim kemarau.

Indonesia merupakan negara kedua setelah Brasil yang menyumbang detores-tri terbesar dalam kancah global dengan kehilangan hampir 3 juta hektar hutan per tahun, penurunan tutupan hutan sekitar 40% (1950–2000) dari 162 juta menjadi 98 juta hektar (Worldwatch Institute 2005)

Pemegang konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH) sering mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan. Para pengusaha tersebut terus menguras hutan tanpa upaya melakukan reboisasi. Bukti pengurasan tersebut dapat dilihat dari makin menyusutnya luas hutan Indonesia. Pada tahun 1940, luas hutan Indonesia mencapai 148 juta ha, dan menurun menjadi 143,90 juta ha pada tahun 1990. Tragisnya pada tahun 1993 luasnya tinggal 108,70 juta ha. Berarti luas hutan Indonesia pada tahun 1993 menurun 24,46% dari luas hutan tahun 1990 atau 26,55% dari luas hutan tahun 1940. Kondisi pascareformasi lebih memprihatinkan karena sumber daya hutan dianggap dapat dimanfaatkan oleh siapa pun sehingga sebagian masyarakat menjarah hutan. Data tersebut menggambarkan tingginya pengurasan sumber daya hutan di Indonesia (Sutopo 1995).

Fungsi hutan yang telah disalahgunakan menimbulkan berbagai masalah dan bencana, seperti gangguan asap akibat kebakaran hutan, meningkatnya kandungan karbondioksida di udara, banjir, erosi, dan meningkatnya suhu bumi. Perkiraan mencairnya es kutub utara pada tahun 2040 merupakan contoh

dampak negatif yang ditimbulkan. Meskipun kontribusi sumber daya hutan dalam perolehan devisa negara cukup besar, nilai itu akan berkurang atau bahkan menjadi tidak ada bila kerusakan hutan akibat eksploitasi yang tidak terkendali menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan manusia serta ekosistem global.

Implikasi ekonomi akibat pengelolaan hutan tanpa memperhatikan aspek lingkungan adalah pembatasan ekspor kayu Indonesia ke negara-negara maju. Mereka menuntut adanya *ecolabelling* untuk ekspor kayu tropis, yaitu label yang menunjukkan kayu berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan dan memperhatikan masyarakat di sekitarnya melalui program bina desa dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Memperhatikan berbagai hal di atas maka pemanfaatan sumber daya hutan harus bijaksana agar memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pemanfaatan hutan secara lestari, sekaligus dapat memelihara dan memperbaiki kapasitas sumber daya menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan (Sutopo 1995). Selain itu, pengelolaan hutan harus berorientasi pada pembangunan berwawasan masyarakat dan lingkungan (*resource and community based development*), yang dijabarkan sebagai berikut: 1) perubahan orientasi produksi kayu dari hutan alam ke hutan tanaman, 2) perubahan orientasi dari hasil hutan kayu ke hasil hutan nonkayu dan jasa, 3) pergeseran pola pengusahaan hutan dari konglomerasi ke peningkatan peran masyarakat, 4) perubahan bentuk pengelolaan hutan dari optimasi produksi log ke optimasi fungsi hutan, dan 5) pergeseran kewenangan pengelolaan hutan dari sentralisasi ke desentralisasi.

Hasil review terhadap hasil penelitian empiris di Indonesia tersebut sangat relevan dengan hasil kajian terkini yang dirilis Juli 2007 oleh William Cline mengenai *Global Warning and Agriculture dalam* Fauzi (2007), perubahan iklim diperkirakan akan menurunkan produksi pertanian antara 10–15%. Apabila tidak ada reorientasi dalam kebijakan ekonomi dari pola pembangunan konvensional ke arah pola pembangunan berkelanjutan, maka produktivitas pertanian bisa menurun sampai 40%. Kondisi ini akan membawa konsekuensi pada peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan di pedesaan.

PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KEMITRAAN USAHA

Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Perhatian terhadap konsep pembangunan berkelanjutan dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk. Satu setengah abad kemudian, Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan buku yang berjudul *The Limit to Growth* (Meadow *et al.* 1972 dalam Fauzi 2006). Dalam kesimpulannya Meadow mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, penyediaan barang dan jasa yang berasal dari sumber daya alam tidak akan dapat dilakukan secara terus-menerus.

Perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan mencuat kembali pada tahun 1987 saat *World Commission on Environment and Development* atau dikenal sebagai *Brundtland Commission* menerbitkan buku berjudul *Our Common Future* (Fauzi 2006). Buku ini kemudian memicu lahirnya agenda baru pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Komisi Brundtland mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Secara operasional, Turner *et al.* (1993) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memaksimalkan manfaat bersih pembangunan ekonomi dengan syarat dapat mempertahankan dan meningkatkan jasa, kualitas dan kuantitas sumber daya alam sepanjang waktu. Selanjutnya *the Agricultural Research Service* (USDA) mendefinisikan pertanian berkelanjutan sebagai pertanian yang pada waktu mendatang dapat bersaing, produktif, menguntungkan, mengkonservasi sumber daya alam, melindungi lingkungan, serta meningkatkan kesehatan, kualitas pangan, dan keselamatan.

Pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam serta perubahan teknologi dan kelembagaan

sedemikian rupa untuk menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang (Food and Agriculture Organization 1989). Pembangunan pertanian, kehutanan, dan perikanan harus mampu mengkonservasi tanah, air, tanaman dan hewan, tidak merusak lingkungan, serta secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak, dan secara sosial dapat diterima.

Pengertian di atas membawa beberapa implikasi pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu: 1) menjamin terpenuhinya secara berkesinambungan kebutuhan dasar nutrisi bagi masyarakat, baik untuk generasi masa kini maupun yang akan datang, 2) dapat menyediakan lapangan kerja dan pendapatan yang layak yang memberikan tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang wajar, 3) memelihara kapasitas produksi pertanian yang berwawasan lingkungan, 4) mengurangi dampak kegiatan pembangunan pertanian yang dapat menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup, dan 5) menghasilkan berbagai produk pertanian, baik primer maupun hasil olahan, yang berkualitas dan higienis serta berdaya saing tinggi.

Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dan Kemitraan Usaha

Secara tertulis Indonesia telah menganut konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Hal ini termuat dalam amandemen UUD 1945, pasal 33 bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis serta kemitraan usaha. Dalam agribisnis dikenal konsep agribisnis sebagai suatu sistem dan agribisnis sebagai suatu usaha (perusahaan). Di samping itu dikenal azas-azas dalam pengembangan agribisnis yang berkelanjutan, seperti dikemukakan oleh Sudaryanto dan Hadi (1993) serta Hadi *et al.* (1994), yaitu terpusat, efisien, menyeluruh dan terpadu, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Struktur agribisnis yang berkembang saat ini dapat digolongkan sebagai tipe

dispersal atau tersekat-sekat, kurang memiliki daya saing, dan tidak berkelanjutan. Hal itu disebabkan oleh tiga faktor utama (Simatupang 1995), yaitu: 1) tidak ada keterkaitan fungsional yang harmonis di antara kegiatan atau pelaku agribisnis, sehingga dinamika pasar belum dapat direspons secara efektif karena tidak adanya koordinasi, 2) terbentuknya margin ganda sehingga ongkos produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil yang harus dibayar konsumen menjadi lebih mahal, atau sistem agribisnis tidak efisien, dan 3) tidak adanya kesetaraan posisi tawar antara petani dan pelaku agribisnis lainnya sehingga petani sulit mendapatkan harga pasar yang wajar. Ada dua sistem koordinasi, yaitu koordinasi melalui harga pasar dan antarpelaku agribisnis. Operasionalnya dapat dilakukan melalui kelembagaan kemitraan usaha agribisnis. Sistem yang pertama tidak dapat menjamin keterpaduan produk, dan sebaliknya untuk sistem kedua.

Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis dan kemitraan usaha memberikan beberapa manfaat sekaligus, yaitu: 1) mengoptimalkan alokasi sumber daya pada satu titik waktu dan lintas generasi, 2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas produk-produk pertanian karena adanya keterpaduan produk berdasarkan tarikan permintaan (*demand driven*), 3) meningkatkan efisiensi masing-masing subsistem agribisnis dan harmonisasi keterkaitan antarsubsistem melalui keterpaduan antarpelaku, 4) terbangunnya kemitraan usaha agribisnis yang saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan, dan 5) adanya kesinambungan usaha yang menjamin stabilitas dan kontinuitas pendapatan seluruh pelaku agribisnis.

Pendekatan tersebut hanya akan berhasil bila dilakukan secara partisipatif. Syahyuti (2006) mendefinisikan partisipasi sebagai proses pelibatan seluruh pihak dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan partisipatif dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan dengan pendekatan sistem agribisnis dan kemitraan usaha adalah proses yang melibatkan keseluruhan pelaku agribisnis dari hulu hingga hilir dalam pengambilan keputusan substansial yang berkaitan dengan eksistensi dan keberlanjutan usaha. Pembangunan pertanian secara partisipatif akan menjamin keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

STRATEGI KEMITRAAN USAHA

Pembangunan pertanian berkelanjutan memiliki tiga tujuan (Sanim 2006), yaitu tujuan ekonomi (efisiensi dan pertumbuhan), tujuan sosial (kepemilikan/keadilan), dan tujuan ekologi (kelestarian sumber daya alam dan lingkungan). Tiga tujuan tersebut saling terkait seperti disajikan pada Gambar 1. Pembangunan pertanian berkelanjutan dapat terwujud bila tiga tujuan pembangunan tersebut tercapai.

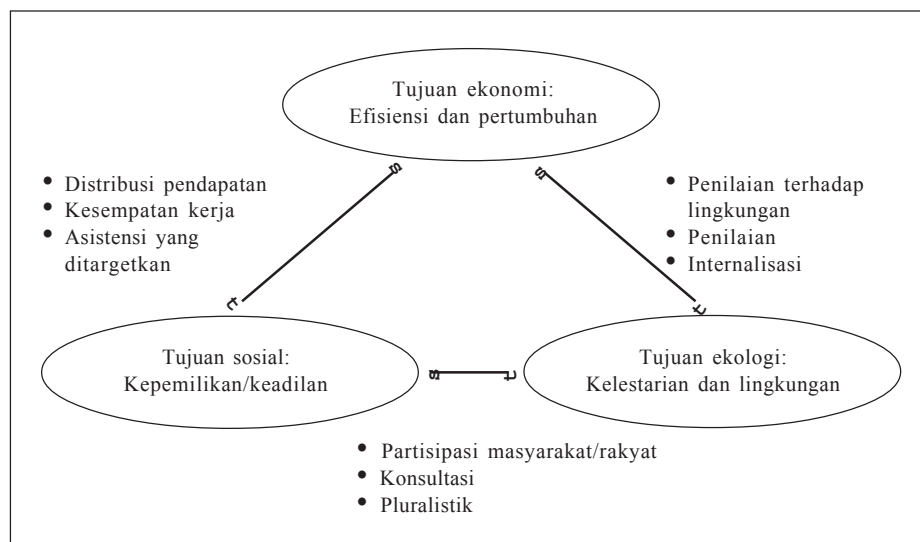
Efisiensi dan pertumbuhan sektor pertanian dapat dipacu melalui pertumbuhan produksi dan pendapatan petani, pembentukan modal, dan peningkatan daya saing. Pemerataan kepemilikan sumber daya dapat ditempuh melalui kebijakan reformasi agraria (*land reform*) serta meningkatkan akses dan kontrol masyarakat petani ke sumber daya pertanian, modal, teknologi, kesejahteraan sosial, dan ketenteraman. Kelestarian sumber daya pertanian dan lingkungan dapat diwujudkan dengan mengembangkan sistem usaha tani ramah lingkungan, memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi dampak negatif eksternal, serta mendorong dampak positif eksternal dalam proses pembangunan.

Keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan ditentukan oleh pelaksanaan revitalisasi pertanian. Krisnamurthi (2006) mengemukakan, revitalisasi pertanian memiliki tiga pengertian. Pertama, sebagai kesadaran akan pentingnya per-

tanian bagi kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia, kedua, sebagai bentuk rumusan harapan masa depan tentang kondisi pertanian, serta ketiga, sebagai kebijakan dan strategi besar melakukan revitalisasi itu sendiri.

Pada bahasan ini, revitalisasi dibatasi pada kelembagaan pertanian, yaitu kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting kelembagaan secara proporsional dan kontekstual. Bukti empiris menunjukkan, penurunan kinerja kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelompok tani pada awal otonomi daerah menjadi salah satu faktor kunci tidak stabilnya produksi pertanian, khususnya padi dan beberapa komoditas palawija.

Padmanagara dalam Gunardi (1980) mendeskripsikan tugas penyuluh pertanian, yaitu: 1) menyebarkan informasi pertanian, 2) mengajarkan keterampilan dan kecakapan bertani yang lebih baik, 3) memberikan rekomendasi berusaha tani yang menguntungkan, 4) mengupayakan fasilitas produksi dan usaha yang lebih menguntungkan dan menggairahkan, serta 5) menimbulkan swadaya dan swadana dalam perbaikan usaha tani. Ke depan, penyuluh pertanian pada era otonomi daerah diharapkan tidak hanya membuat petani mampu berproduksi sesuai anjuran, tetapi juga dapat berproduksi secara mandiri berdasarkan rasionalitas ekonomi sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Penyuluh pertanian bukan hanya sebagai penyampai informasi dan teknologi, tetapi juga sebagai agen untuk menciptakan pertanian sebagai



Sumber: Sanim (2006).

Gambar 1. Hubungan antara tiga tujuan pembangunan berkelanjutan.

usaha yang menguntungkan. Singkatnya, penyuluh pertanian harus mampu memfasilitasi dan mediasi untuk mengembangkan kemitraan usaha agribisnis.

Kelembagaan kelompok tani perlu pula melakukan konsolidasi, baik dari aspek keanggotaan, manajemen maupun orientasi usaha. Kelembagaan kelompok tani ke depan hendaknya mampu mentransformasikan diri dari kelembagaan usaha tani dalam ikatan horizontal menuju kelembagaan yang berorientasi pasar dan terintegrasi secara vertikal, atau berbentuk koperasi agribisnis yang berbadan hukum.

Adnyana (2005) memperkenalkan suatu kelembagaan petani yang disebut "Sistem Agribisnis Korporasi Terpadu" (*Integrated Corporate Agribusiness System*). Pada kelembagaan ini, petani melakukan konsolidasi manajemen usaha pada hamparan lahan yang memenuhi skala usaha, misalnya 50–100 ha. Konsolidasi manajemen dituangkan dalam bentuk kelembagaan agribisnis seperti Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT), sistem kebersamaan ekonomi, dan lainnya. Kelompok usaha tersebut sebaiknya berbentuk korporasi, asosiasi atau koperasi yang berbadan hukum serta

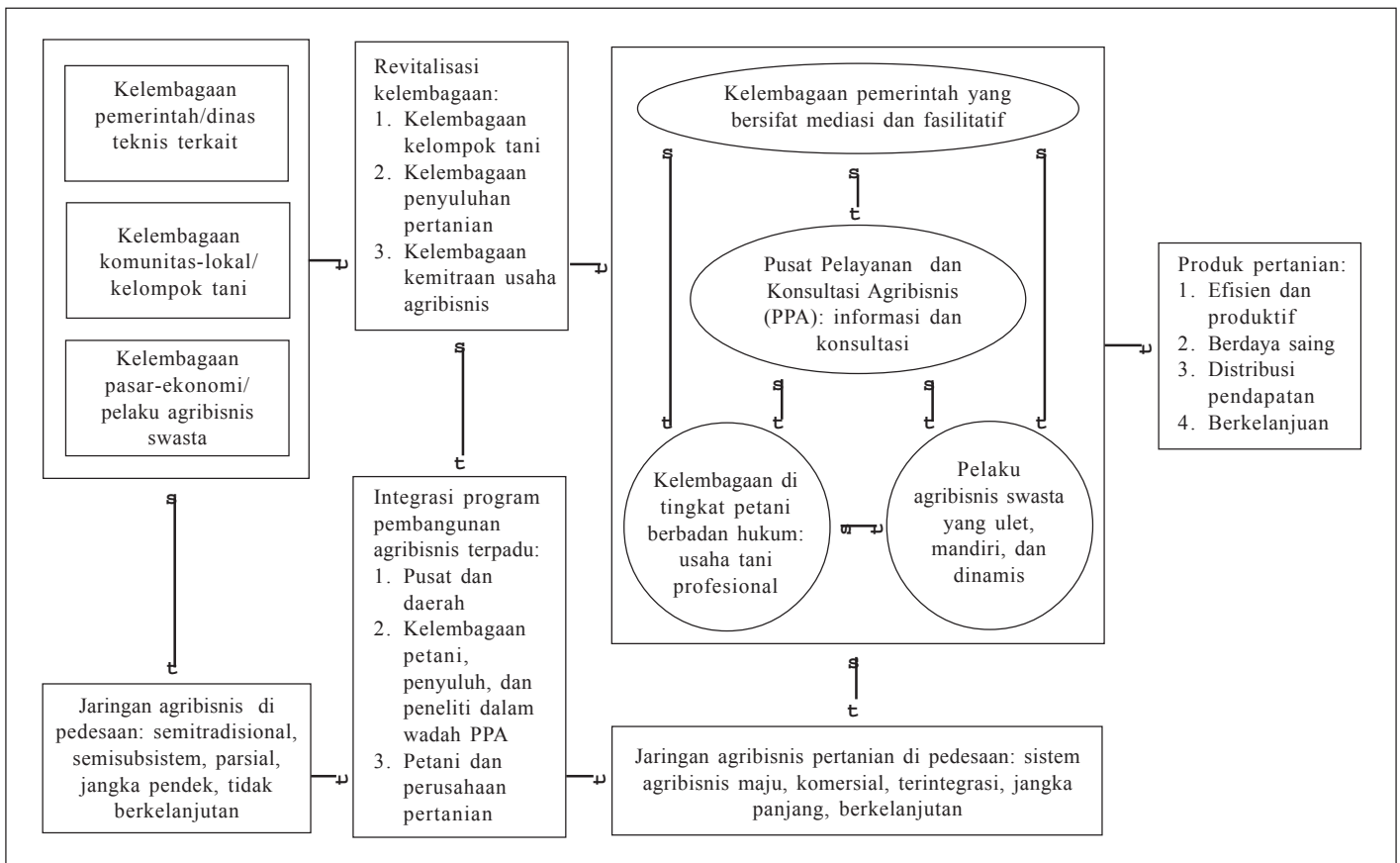
menerapkan manajemen korporasi dalam menjalankan usahanya. Kelompok juga mengembangkan pola kemitraan terpadu secara tidak langsung dengan mitra.

Alternatif model adalah pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha. Model ini tetap mempertimbangkan berbagai bentuk kelembagaan sebagai penopang kehidupan masyarakat, yaitu kelembagaan yang hidup dan telah diterima oleh komunitas lokal atau tradisional (*voluntary sector*), kelembagaan pasar atau ekonomi (*private sector*), dan kelembagaan politik/pemerintah atau sistem pengambilan keputusan di tingkat publik (*public sector*) (Etzioni 1961). Pengembangan model pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha di pedesaan dengan melakukan revitalisasi kelembagaan kelompok tani dan penyuluhan disajikan pada Gambar 2.

Pemberdayaan petani menjadi petani mandiri dan profesional dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani melalui pelatihan, penelitian, magang dan sebagainya, baik secara individu maupun kelompok. Kedua, melakukan revitalisasi kelompok tani mandiri ke arah

kelembagaan formal berbadan hukum (koperasi petani atau koperasi agribisnis, asosiasi petani komoditas tertentu). Ketiga, mengangkat penyuluh swakarsa atau petani petandu (dalam program SLPHT) sebagai mitra penyuluh untuk memperlancar difusi dan adopsi teknologi. Keempat, memberdayakan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menjadi Pusat Pelayanan dan Konsultasi Agribisnis (PPA) di setiap kecamatan melalui sistem penyuluhan partisipatif.

Kelembagaan di tingkat petani seperti kelompok tani yang belum mandiri perlu direvitalisasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Jumlah anggota kelompok dibatasi 20–25 orang untuk memudahkan penyatuan pendapat dan penggalangan kerja sama (partisipasi). Hal ini didasarkan pada keberhasilan berbagai program pembangunan pertanian melalui pendekatan kelompok-kelompok kecil dan proses seleksi yang baik, seperti Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) dan SLPHT. Kelompok tani mandiri didorong untuk mengkonsolidasikan diri dalam kelembagaan formal berbadan hukum, sehingga me-



Gambar 2. Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha agribisnis.

mudahkan melakukan transaksi dan kemitraan usaha agribisnis.

Kelompok-kelompok tani dapat disatukan dalam bentuk gabungan kelompok tani (gapoktan), asosiasi petani atau asosiasi agribisnis yang anggotanya adalah para pengurus kelompok tani. Ketua-ketua kelompok tani diangkat sebagai penyuluh swakarsa yang bertanggung jawab akan perkembangan kelompoknya. Jika memungkinkan, penyuluh swakarsa mendapat insentif atau honor yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemahaman terhadap berbagai aspek pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) merupakan prasyarat untuk menjadi penyuluh swakarsa. Gapoktan atau asosiasi dipimpin oleh se-orang ketua atau koordinator penyuluh swakarsa desa (jabatan ini hampir sama dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang berlaku sekarang). Para penyuluh swakarsa akan menjadi mitra Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam mengembangkan pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha agribisnis. Perencanaan pengembangan pembangunan pertanian berkelanjutan dan kemitraan usaha agribisnis di pedesaan dan kelompok tani disusun bersama secara partisipatif dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yaitu suatu pendekatan dan metode untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan masyarakat desa. Dalam hal ini, PPL dan penyuluh swakarsa didampingi peneliti agar metode yang digunakan tepat dan sesuai sasaran.

Perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha agribisnis merupakan kunci keberhasilan pembangunan pertanian, baik dari tingkatan (*magnitude*), stabilitas maupun kontinuitasnya. Oleh karena itu, kegiatan awal yang mutlak dilakukan adalah melatih penyuluh agar memahami teknik dan filosofi PRA. Dalam penerapan di lapangan, penyuluh didampingi dan difasilitasi peneliti yang berpengalaman dan menguasai teknik PRA. Keluaran PRA adalah rencana kerja atau program pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha agribisnis. Program difokuskan pada: 1) perencanaan pola tata tanam untuk mengatur produksi sehingga tepat jenis, volume, kualitas serta berkelanjutan, 2) diseminasi teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, 3) pengelolaan usaha simpan-pinjam, 4) pengadaan sarana produksi melalui kios saprodi kelompok,

5) penanganan pascapanen dengan memperhatikan keamanan pangan, dan 6) pemasaran hasil secara berkelompok, baik melalui kelompok tani maupun koperasi agribisnis.

Dalam era otonomi daerah, PPL dan penyuluh swakarsa bertugas di tingkat desa dan berkantor di PPA di tingkat kecamatan. Namun untuk memperlancar tugas, di setiap desa yang menjadi wilayah kerjanya perlu ada sekretariat. Semua bantuan teknis penyediaan infrastruktur fisik, peralatan dan bahan, dana, serta bimbingan teknis disediakan dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD. Permasalahan yang muncul dimusyawarahkan di PPA, namun bila sulit terpecahkan, penyuluh bisa menghubungi dan atau memanggil peneliti/penyuluh BPTP, lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Koordinator PPL berfungsi sebagai ketua pelaksana PPA, dan bersama gapoktan dan asosiasi petani atau asosiasi agribisnis merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan agribisnis pedesaan.

Bila sistem ini berhasil dikembangkan, diharapkan masyarakat petani secara aktif mendatangi PPA untuk mengakses informasi teknologi dan pasar atau berkonsultasi tentang masalah yang dihadapi. Dengan demikian, penyuluhan partisipatif dapat berjalan dengan baik dan petani terdidik untuk bertindak secara profesional. Konsultasi dapat dilakukan secara pribadi atau melalui musyawarah kelompok (sebaiknya diawali dengan musyawarah kelompok, bila tidak teratasi baru dimajukan ke musyawarah gapoktan atau asosiasi petani/asosiasi agribisnis). PPA tidak hanya merencanakan pengembangan agribisnis, tetapi juga memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya petani, PPL, dan penyuluh swakarsa, serta sebagai mediator bagi terbangunnya kemitraan usaha antarpelaku agribisnis yang saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.

Implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha agribisnis adalah sebagai berikut. Petani melakukan konsolidasi dalam wadah kelompok tani. Selanjutnya, kelompok tani mandiri ditransformasikan dalam kelembagaan formal berbadan hukum (koperasi pertanian, koperasi agribisnis, atau kelembagaan lainnya sesuai kebutuhan). Kelompok tani mandiri atau kelembagaan berbadan hukum meng-

konsolidasikan diri dalam gapoktan atau asosiasi petani/asosiasi agribisnis, lalu melakukan konsolidasi manajemen usaha pada hamparan lahan yang memenuhi kelayakan usaha (skala usaha bergantung jenis komoditas, 25–100 ha), serta kesinambungan usaha. Pilihan komoditas atau kelompok komoditas disesuaikan dengan potensi wilayah dan permintaan pasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Manajemen korporasi diterapkan dalam menjalankan sistem usaha agribisnis yang berkeadilan. Pemilihan perusahaan mitra mengacu pada rekomendasi dinas dan atau direktorat teknis, yang didasarkan atas komitmennya membangun masyarakat agribisnis. Kelembagaan PPA diperlukan sebagai mediator dan fasilitator dalam membangun kelembagaan kemitraan usaha terpadu.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pergeseran pola pembangunan dari pola konvensional ke arah pembangunan berkelanjutan makin diterima oleh banyak negara sebagai konsekuensi logis dari kesadaran masyarakat internasional akan produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan ramah lingkungan. Perubahan paradigma menuju pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan dalam jangka pendek dan parsial, namun merupakan upaya jangka panjang, terus-menerus, dan menyeluruh.

Kebijakan yang dipandang tepat di Indonesia adalah pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha agribisnis secara partisipatif. Kebijakan ini dapat menjamin efisiensi dan pertumbuhan, keadilan atau pemerataan, serta berwawasan lingkungan. Pada subsistem produksi diterapkan pendekatan sistem usaha tani rotasi tanaman dan daur ulang bahan organik, teknik konservasi, pengurangan *input* kimia (*low input sustainable agriculture*), pengendalian hama terpadu, dan sistem produksi tanaman-ternak. Pada subsistem lainnya dilakukan dengan menekan seminimal mungkin limbah yang dihasilkan, mengelola limbah secara baik, serta membangun mekanisme pasar dalam penetapan harga dan pembagian nilai tambah atau keuntungan.

Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pengembangan kemitraan usaha agribisnis hanya akan berhasil jika

dilakukan secara partisipatif, yaitu melibatkan seluruh pelaku agribisnis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Dengan cara ini diharapkan dapat tercapai stabilitas dan kontinuitas produksi, pendapatan, dan kesinambungan usaha.

Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui strategi kemitraan usaha agribisnis memerlukan konsolidasi kelembagaan. Pada tahap awal dilakukan konsolidasi petani dalam wadah kelompok tani mandiri berbadan hukum. Kelompok tani tersebut lalu mengkonsolidasikan diri dalam bentuk gapoktan atau asosiasi petani/asosiasi agribisnis. Langkah selanjutnya adalah melakukan konsolidasi manajemen usaha pada hamparan lahan yang memenuhi skala usaha ekonomi. Pilihan komoditas atau kelompok komoditas disesuaikan dengan potensi wilayah, permintaan pasar, dan kelestarian lingkungan. Sistem

usaha agribisnis berkelanjutan dijalankan dengan menerapkan manajemen korporasi. Pemilihan perusahaan mitra didasarkan pada rekomendasi dinas dan atau direktorat teknis yang didasarkan atas komitmennya membangun masyarakat agribisnis. Kelembagaan PPA berfungsi sebagai mediator dan fasilitator terbangunnya kelembagaan kemitraan usaha terpadu.

Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha agribisnis mampu memberikan manfaat, antara lain: 1) meningkatkan produksi pertanian secara moderat, stabil, dan berkelanjutan, 2) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, 3) mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di pedesaan, 4) meningkatkan pemerataan dan keadilan sosial, 5) menciptakan kerja dan lapangan berusaha, 6) meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan lingkungan, 7) meningkatkan partisi-

pasi dan pemberdayaan petani dan pelaku agribisnis, serta 8) melestarikan kualitas lingkungan untuk mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa saran operasional dalam pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha agribisnis adalah: 1) revitalisasi kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani, 2) pengaturan produksi berdasarkan permintaan pasar melalui perencanaan pola tanam dan kemitraan usaha yang mandiri, 3) pemilihan komoditas berdasarkan permintaan pasar dan potensi sumber daya alam, 4) pengembangan kelembagaan kemitraan usaha agribisnis sesuai kondisi setempat untuk menjamin keterpaduan produk dan pelaku agribisnis, serta 5) pengembangan hasil dari pendekatan komoditas ke arah pengembangan produk berkualitas didukung strategi promosi, teknologi, dan fasilitasi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M.O. 2005. Lintasan dan Marka Jalan Menuju Ketahanan Pangan Terlanjutkan dalam Era Perdagangan Bebas. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama Bidang Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Clark, R.J. 1996. Coastal Zone Management Hand Book. CRC Lewis Publishers, Boca Raton, Florida. 694 pp.
- Etzioni, A. 1961. A Competitive Analysis of Complex Organization: on Power, Involvement, and Their Correlates. The Free Press of Glencoe, Inc., New York.
- Fauzi, A. 2006. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan aplikasi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fauzi, A. 2007. Economic of Nature's Non-Convexity Reorientasi. Pembangunan Ekonomi Sumberdaya Alam dan Implikasinya bagi Indonesia. Orasi Ilmiah Guru Besar Ilmu Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 10 November 2007.
- Food and Agriculture Organization. 1989. World. The State of Food and Agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
- Gunardi. 1980. Kumpulan Bahan Bacaan Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hadi, P.U., R. Sajuti, Saptana, Erwidodo, M. Rachmat, Kh.M. Noekman, dan A. Djauhari. 1994. Analisa Kebijakan Pengembangan Agribisnis Perikanan dan Hortikultura: Model Pengembangan Agribisnis Mangga. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Krisnamurthi, B. 2006. Revitalisasi Pertanian: Sebuah konsekuensi sejarah dan tuntutan masa depan. *Dalam* Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Sanim, B. 2006. Analisis Ekonomi Lingkungan dan Audit Lingkungan. Makalah disampaikan pada Pelatihan Dosen Perguruan Tinggi Negeri Se-Jawa dan Bali dalam Bidang Audit Lingkungan, Bogor, 11–20 September 2006.
- Saptana. 2003. Efisiensi dan Daya Saing Usaha Tani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian bekerja sama dengan BAPPENAS/ USAID/DAI. Bogor.
- Saptana dan T. Pranadji. 1994. Dampak Kapitalisasi terhadap Sustainability Pertambakan Udang. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pengembangan Agribisnis Bidang Peternakan dan Perikanan pada Pelita VI dalam rangka Dies Natalis ke-30 Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Saptana, E.L. Hastuti, K.S. Indraningsih, Ashari, S. Friyatno, Sunarsih, dan V. Darwis. 2005. Pengembangan Model Kelembagaan Kemitraan Usaha yang Berdaya Saing di Kawasan Sentra Produksi Hortikultura. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Sayogyo. 1990. Manusia dan Produktivitas Pertanian Penopang Lepas Landas Kita. Prisma No.2 Tahun XIX. LP3ES, Jakarta.
- Simatupang, P. 1995. Industrialisasi Pertanian sebagai Strategi Agribisnis dan Pembangunan Pertanian dalam Era Globalisasi. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama Bidang Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Sudaryanto, T. dan P.U. Hadi. 1993. Konsepsi dan lingkup agribisnis. Makalah Seminar Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Sutopo, M.F. 1995. Serasah Ekonomi Sumber Daya Hutan Tropis Indonesia. Institute for Islamic Economics Studies, Yayasan Khoiru Ummah, Bogor.
- Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan, Penjelasan tentang "Konsep, Istilah, Teori dan Indikator serta Variabel". PT Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Turner, P.K., D. Pearce, and I. Bateman. 1993. Environmental Economic: An elementary introduction. John Hopkins University Press, Baltimore.
- Worldwatch Institute. 2005. Vital Sign 2005. NN Norton and Company, New York.
- Yusdja, Y., C. Saleh, M. Amir, dan Al Sri Bagyo. 1992. Studi Baseline Aspek Sosial Ekonomi Pengendalian Hama Terpadu. Kerja Sama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Monograph Series No. 6. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.